

**PENGARUH AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(LKPD) TERHADAP TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH DAERAH (STUDI
KASUS SKPD KEPUALAUAN RIAU)**

**EFFECT OF ACCOUNTABILITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL
STATEMENTS (LKPD ON REGIONAL CORRUPTION LEVELS (CASE STUDY
SKPD RIAU ISLANDS**

Aznedra¹, Nurhayaty², Rizki Eka Putra³

¹(Akuntansi, Ekonomi, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia)

²(Akuntansi, Ekonomi, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia)

¹nedrasukses@gmail.com ²nurhayaty377@gmail.com ³rizkiekaputra@gmail.com

Abstract

This research was conducted at the Riau Islands SKPD with the aim to find out and analyze the Effect of the Accountability of the Regional Financial Statements (LKPD) Against Regional Government Corruption (Case Study of the Riau Islands SKPD). This research uses descriptive analysis and statistical analysis methods. The results of the analysis of audit opinion with a proxy for four types of audit opinions issued by the Indonesian Audit Board of the Republic of Indonesia on the financial statements of the local government on the corruption perception index showed that the audit opinion variable (X1) t value was 2,272 with a probability of 0.211. With t count 2,272 greater than t-table 0.05 (40) 2,021 or probability 0.211 greater than 0.05; then H0 is accepted which means that the Audit Opinion variable (X1) partially or individually has no significant effect on the Corruption Perception Index (Y) in the Riau Islands Province LKPD. This result means that the audit opinion issued by BPK RI does not affect the perception of the regional government. Although the results of an opinion from a fair LKPD without exception does not mean that the government has a low level of corruption

Keywords ; Accountability, LKPD, Corruption

PENDAHULUAN.

Melihat fenomena korupsi yang terus menjamur di Indonesia, akan menyebabkan semakin kecilnya kepercayaan masyarakat akan kinerja khususnya di instansi pemerintah. Fenomena korupsi di daerah yang semakin terbuka, ini terjadi karena terdapat perbedaan atau ketidak konsistensian peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah hingga akhir 2018, Indonesia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dalam Corruption Perception Index (Indeks Persepsi Korupsi) 2018, Indonesia menempati posisi 89 dari 180 negara dengan angka 38 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih). Dalam data tersebut diungkapkan bahwa korupsi menempati urutan teratas dari 18 (delapan belas) faktor penghambat kemudahan berusaha di Indonesia.

Menurut Heriningsih (2014) Akuntabilitas Pemerintah Daerah

merupakan tingkat pengukuran kinerja yang diukur dengan menggunakan hasil audit BPK RI atas LKPD setiap tahunnya. Terdapat tiga indikator pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yang merupakan tiga hasil yang terdapat dalam LKPD yang telah diaudit. Opini auditor menjadi pusat perhatian dalam setiap laporan kinerja suatu entitas demikian juga dengan penelitian ini sehingga dengan menggunakan penalaran bahwa jika Pemerintah daerah memperoleh opini WTP (wajar tanpa pengecualian) maka harapannya akan semakin bagus kinerja pemerintah daerah dan pastinya korupsi tidak dapat terjadi. Sedangkan jika terdapat tingkat kelemahan pada Sistem pengendalian internal maka tentu terdapat tambahan masukan untuk memperbaiki pengendalian agar lebih efektif di tahun berikutnya. Yang ke tiga ketaatan pada perundang-undangan dapat dikatakan bahwa semakin banyak ditemukan

ketidaktaatan maka akan mudah disinyalir bisa terindikasi terjadinya korupsi.

Terciptanya suatu pemerintah daerah yang sangat akuntabel akan menjadi suatu harapan tersendiri bagi masyarakat, sehingga tercipta suatu sistem pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai entitas yang mengelola dan bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan daerah. Opini audit BPK RI terdiri dari empat opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified opinion*), Tidak Wajar (TW/*Adverse opinion*) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP/*Disclaimer opinion*).

Untuk menghindari terjadinya korupsi di pemerintahan daerah, maka pengelolaan pemerintah daerah harus akuntabel dan diperlukan sistem pengawasan yang handal. Dengan terciptanya pemerintah daerah yang akuntabel. Hasil evaluasi SPI oleh BPK menunjukkan kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian intern yang dapat dikelompokkan sebagai kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Semakin banyak kelemahan sistem pengendalian intern yang terjadi pada suatu pemerintah daerah berarti menunjukkan tingkat akuntabilitasnya semakin rendah dan akan meningkatkan peluang terjadinya korupsi. Hal ini terjadi karena salah satu penyebab korupsi adalah adanya sistem yang sangat lemah sebagaimana disampaikan M Jasin, wakil ketua KPK (2008), bahwa kelemahan sistem menimbulkan potensi tindak pidana pada korupsi.

Komponen terakhir yang telah diungkapkan pada BPK dalam rangka menilai akuntabilitas LKPD yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan. Pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dilaksanakan guna mendeteksi

salah saji material yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas laporan keuangan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Identifikasi Masalah.Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan terdapat beberapa identifikasi permasalahan yang muncul pada objek penelitian. diantaranya yaitu Terjadi opini audit laporan keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah Kepulauan Riau, Terjadinya sistem pengendalian intern laporan keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah provinsi Kepulauan Riau, Terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan laporan keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah provinsi Kepulauan Riau.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas, yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Peneliti melakukan pengamatan terhadap konsekuensi-konsekuensi yang timbul dan menelusuri kembali fakta yang secara masuk akal sebagai faktor-faktor penyebabnya (Hadi, 2009). Penelitian kausalitas merupakan penelitian tentang hubungan antara opini audit, sistem pengendalian internal, dan ketidakpatuhan terhadap perundangundangan laporan keuangan keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah.

PEMBAHASAN.

Tabel 1
Statistik Deskriptif menunjukkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan tingkat standar deviasi dari masing-masing variabel yang diuji.

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Opini Audit	40	.00	1.00	.8250	.38481	.148
Kelemahan SPI	40	4.00	34.00	12.9500	8.18989	67.074
Ketidakpatuhan PPU	40	1.00	25.00	11.3000	5.44059	29.600
Tingkat Korupsi	40	32.00	63.90	52.3375	7.71866	59.578
Valid N (listwise)	40					

Sumber: Data Diolah Sendiri (2020)

Hasil uji diatas menunjukkan variabel Opini Audit diukur dengan menggunakan proksi variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy).1 : kategori unqualified yang terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified opinion*) 0: non unqualified yang terdiri dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified opinion*), Tidak Wajar (TW/*Adverse opinion*) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP/*Disclaimer opinion*) Penggunaan ROE sebagai proksi dari profitabilitas mengikuti penelitian dari Murcia dan Santos (2010). Variabel opini audit memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1.

Variabel yang berikutnya adalah kelemahan sistem pengendalian internal (KSPI) yang diukur dengan menghitung jumlah kasus kelemahan sistem pengendalian internal atas LKPD yang dilaporkan oleh BPK. Pada analisis deskriptif dapat dilihat bahwa nilai minimum 4 dan nilai maksimumnya adalah 34 jumlah temuan lemahnya sistem pengendalian internal setiap LKPD pada provinsi Kepulauan Riau. Variabel berikutnya adalah ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KTKPPU). Variabel ini diukur dengan menghitung jumlah kasus ketidakpatuhan

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LKPD yang dilaporkan BPK. Pada analisis deskriptif dapat dilihat bahwa nilai minimum 1 dan nilai maksimumnya adalah 25 jumlah temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan setiap LKPD pada provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	7.51641594
Most Extreme Differences	Absolute	.151
	Positive	.073
	Negative	-.151
Test Statistic		.151
Asymp. Sig. (2-tailed)		.062 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Diolah Sendiri (20

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat hasil Kolmogorov-Smirnov untuk Asymp. Sig adalah 0.0627. Hasil tersebut lebih besar dari 0.05, maka disimpulkan data berdistribusi normal. Dengan Demikian, uji statistic (uji t dan uji f) dapat dilakukan pada penelitian ini untuk menguji hipotesis.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Opini Audit	0.293	3.414	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Kelemahan SPI	0.269	3.719	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Ketidakpatuhan PPU	0.769	1.301	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data Diolah Sendiri (2020)

Pada table 3 diketahui dapat diketahui bahwa hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai tolerance diatas 0.10 dan nilai variance inflation factor (VIF) dibawah angka 10 untuk setiap variabel. Nilai tolerance yang dihasilkan untuk variabel opini audit, kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar 0.293, 0.296, dan 0.769 sedangkan nilai VIF yang dihasilkan untuk variabel opini audit,

kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan sebesar 3.414, 3.719, dan 1.301. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam model regresi tidak terdapat problem multikolinearitas dan layak digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.227 ^a	.052	-.027	7.82333	.861

a. Predictors: (Constant), Ketidakpatuhan PPU, Opini Audit, Kelemahan SPI

b. Dependent Variable: Tingkat Korupsi

Sumber: Data Diolah Sendiri (2020)

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi dengan bantuan program komputer SPSS 22.00 diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) 0.861. Dengan nilai DW 0.861 yang berada di antara -2 sampai +2 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak ada masalah autokorelasi. Berdasarkan uji asumsi klasik (normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, heteroskedastisitas) diperoleh bahwa dalam model yang digunakan sudah terjadi penyimpangan asumsi klasik, artinya model regresi pada penelitian dapat digunakan sebagai dasar analisis.

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	42.098	8.575		4.909	.000
	Opini Audit	7.652	6.015	.381	2.272	.211
	Kelemahan SPI	.401	.295	.425	1.358	.183
	Ketidakpatuhan PPU	-.112	.263	-.079	-.425	.673

a. Dependent Variable: Tingkat Korupsi

Sumber: Data Diolah Sendiri (2020)

- Nilai konstanta bernilai positif yaitu 42.098 hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel Opini Audit (X_1), Kelemahan SPI (X_2), dan Ketidakpatuhan PPU (X_3) terhadap

Indeks Persepsi Korupsi (Y) akan naik sebesar 42.098.

- Koefisien regresi variabel Opini Audit (b1) bernilai positif yaitu sebesar 7.652. Hal ini menunjukkan apabila Opini Audit (X_1) meningkat, maka IPK (Y) akan naik sebesar 7.652 dengan anggapan variabel bebas lainnya konstan.
- Koefisien regresi variabel kelemahan sistem pengendalian internal (b2) bernilai positif yaitu sebesar 0.401. Hal ini menunjukkan apabila kelemahan sistem pengendalian internal (X_2) meningkat, maka IPK (Y) akan turun sebesar 0.401 dengan anggapan variabel bebas lainnya konstan.
- Koefisien regresi variabel ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (b3) bernilai negatif yaitu sebesar 0.112. Hal ini menunjukkan apabila ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (X_3) meningkat, maka IPK (Y) akan turun sebesar 0.112 dengan anggapan variabel bebas lainnya konstan.

Tabel 6
Hasil Uji Adjusted-R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.227 ^a	.052	-.027	7.82333	.861

a. Predictors: (Constant), Ketidakpatuhan PPU, Opini Audit, Kelemahan SPI

b. Dependent Variable: Tingkat Korupsi

Sumber: Data Diolah Sendiri (2020)

Berdasarkan Tabel 6 tersebut dapat dilihat hasil Adjusted- R² dengan bantuan program SPSS dalam analisis regresi berganda diperoleh angka determinasi yang disesuaikan atau Adjusted- R² sebesar 0.227. Hal ini berarti 28% variasi Adjusted R Square dijelaskan oleh variasi perubahan faktor-faktor opini audit (X_1), kelemahan SPI (X_2), dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (X_3) secara bersama-sama (simultan) terhadap Indeks Persepsi Korupsi (Y). Sementara sisanya

sebesar 72% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak ikut terobservasi yang mempengaruhi variabel IPK. Oleh sebab itu, diperlukan pengembangan penelitian lebih.

Tabel 7
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	120.170	3	40.057	.654	.585 ^b
	Residual	2203.364	36	61.205		
	Total	2323.534	39			

a. Dependent Variable: Tingkat Korupsi

b. Predictors: (Constant), Ketidapatuhan PPU, Opini Audit, Kelemahan SPI

Sumber: Data Diolah Sendiri (2020)

Berdasarkan table di atas diperoleh hasil analisis untuk nilai F adalah sebesar 0.654 dengan probabilitas sebesar 0.585. Nilai F tabel_{0.05(3)(40)} adalah sebesar 2.84. Oleh karena itu dengan nilai F hitung lebih besar dari F tabel_{0.05(3)(40)} yaitu $63.015 > 2.84$ atau probabilitas F hitung 0.585 lebih besar dari 0.05 maka H₀ diterima dan H₁ ditolak. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Opini Audit (X₁), Kelemahan SPI (X₂), dan Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan (X₃) secara bersama-sama (simultan) terhadap Indeks Persepsi Korupsi (Y) pada LKPD Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 8
Hasil Uji t atau Parsial
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	42.098	8.575		4.909	.000
	Opini Audit	7.652	6.015	.381	2.272	.211
	Kelemahan SPI	.401	.295	.425	1.358	.018
	Ketidapatuhan PPU	-.112	.263	-.079	-2.425	.673

a. Dependent Variable: Tingkat Korupsi

Sumber: Data Diolah Sendiri (2020)

1. Opini Audit (X₁)

Berdasarkan tabel 8 hasil pengolahan variabel Opini audit (X₁) diperoleh nilai t hitung sebesar 2.272 dengan probabilitas 0.211. Dengan t hitung 2.272 lebih besar dari t-tabel_{0.05(40)} 2.021 atau probabilitas 0.211 lebih besar dari 0.05; maka H₀ diterima yang berarti bahwa

variabel Opini Audit (X₁) secara parsial atau individu tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi (Y) pada LKPD Provinsi Kepulauan Riau.

2. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal (X₂)

Berdasarkan tabel 8 hasil pengolahan variabel kelemahan SPI (X₂) diperoleh nilai t hitung sebesar 1.917 dengan probabilitas 0.058. Dengan t hitung 1.358 lebih kecil dari t-tabel_{0.05(40)} 2.021 atau probabilitas 0.0128 lebih besar dari 0.05; maka H₀ ditolak yang berarti bahwa variabel kelemahan SPI (X₂) secara parsial atau individu berpengaruh signifikan positif terhadap Indeks Persepsi Korupsi (Y) pada LKPD Provinsi Kepulauan Riau.

3. Ketidapatuhan terhadap perundang-undangan (X₃)

Berdasarkan tabel 8 hasil analisis variabel ketidapatuhan terhadap perundang-undangan (X₃) diperoleh nilai t hitung sebesar -2.425 dengan probabilitas 0.673. Dengan t hitung -2.425 lebih besar dari t-tabel_{0.05(40)} 2.021 atau probabilitas 0.673 lebih besar dari 0.05; maka H₀ diterima yang berarti bahwa variabel ketidapatuhan terhadap perundang-undangan (X₃) secara parsial atau individu tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi (Y) pada LKPD Provinsi Kepulauan Riau.

KESIMPULAN.

Hasil analisis opini audit dengan proksi empat jenis opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia tentang laporan keuangan pemerintah daerah terhadap indeks persepsi korupsi menunjukkan bahwa variabel Opini audit (X₁) nilai t hitung sebesar 2.272 dengan probabilitas 0.211. Dengan t hitung 2.272 lebih besar dari t-tabel 0.05(40) 2.021 atau probabilitas 0.211 lebih besar dari 0.05; maka H₀ diterima yang berarti

bahwa variable Opini Audit (X1) secara parsial atau individu tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi (Y) pada LKPD Provinsi Kepulauan Riau. Hasil ini berarti opini audit yang dikeluarkan oleh BPK RI tidak mempengaruhi persepsi dari pemerintah daerah. Walaupun hasil opini dari suatu LKPD Wajar tanpa pengecualian tidak berarti pemerintah tersebut tingkat korupsinya rendah.

Hasil pengolahan variable Kelemahan system pengendalian internal (X₂) diperoleh nilai t hitung sebesar 1.917 dengan probabilitas 0.058. Dengan t hitung 1.358 lebih kecil dari t-tabel_{0,05(40)}2.021 atau probabilitas 0.0128 lebih besar dari 0.05; maka H₀ ditolak yang berarti bahwa variable kelemahan SPI (X₂) secara parsial atau individu berpengaruh signifikan positif terhadap Indeks Persepsi Korupsi (Y) pada LKPD Provinsi Kepulauan Riau. Hasil analisis variable ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan (X₃) diperoleh nilai t hitung sebesar -2.425 dengan probabilitas 0.673. Dengan t hitung -2.425 lebih besar dari t-tabel_{0,05(40)} 2.021 atau probabilitas 0.673 lebih besar dari 0.05; maka H₀ diterima yang berarti bahwa variable ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan (X₃) secara parsial atau individu tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi (Y) pada LKPD Provinsi Kepulauan Riau.

SARAN.

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, sarat yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar memperoleh hasil yang lebih baik, yaitu untuk peneliti selanjutnya hendaknya mampu mengembangkan model penelitian ini dengan sampel yang lebih besar, dan sistem pengukuran indeks korupsi

yang berbeda, misalnya menggunakan data-data kejaksaan tentang jumlah kerugian negara akibat kasus korupsi yang dilakukan pejabat publik yang kasusnya telah ditangani oleh KPK dan kejaksaan dan telah divonis bersalah. Mencari variabel independen lain yang sesuai dan mempengaruhi secara signifikan luasnya pengungkapan sukarela pada perusahaan di Indonesia yaitu melakukan penelitian dengan rentang waktu yang lebih luas untuk menguji apakah hasil penelitian ini tetap konsisten.

Daftar Pustaka.

- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hadi, Syamsul. 2009. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Edisi pertama. Cetakan kedua. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Penerbit EKONISIA. Yogyakarta
- Heriningsih Sucahyo, Marita. 2013. Pengaruh Opini Audit Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa) Vol. 11, No. 1, April 2013 hal 1-86
- Heriningsih Sucahyo. 2014. Kajian Empiris Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Kabupaten Kota di Indonesia, Paradigma Volume 18, No 2
- Masyitoh R.D, Ratna W, Dyah S. 2015. Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil

- Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010, Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara, Medan 16-19
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2009, Akuntansi Sektor Publik, Andi Offset, Yogyakarta
- SKPD Batam. (2015, 15 Desember. Badan Pemeriksa Keuangan. Diperoleh 07 Desember 2019 , dari <https://arsipskpd.batam.go>.
- Setyapurnama, Yudi Santaradan A.M. Vianey Norpratiwi. 2006. Pengaruh Corporate Governance pada Peringkat Obligasidan Yield Obligasi. Jurnal Akuntansi & Bisnis. Vol. 7. No. 2, Agustus 2007: 107-108
- Setyowati, L.danY.K.Suparwati. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai variabel intervening (Studi Empiris Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah). Prestasi. Vol.9(1) : 113-133
- Shah, Anwar, (Editor). 2009. Performance Accountability and Combating Corruption. Washington DC: The World Bank
- Teguh, Kurniawan. 2010. Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan, Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Mei–Agustus 2009, hlm. 116-121
- Transparency International Indonesia (TII). 2015. Survei Persepsi Korupsi 2015, Danish Royal Embassy: Jakarta
- Uma Sekaran. 2010. Metodologi Penelitian Bisnis, Edisi 4, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat